



RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2026

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp. (0265) 543342 Faks (0265) 543340
Website : bappelitbangda.tasikmalayakab.go.id Email : bappelitbangda@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 000.1.9/1563/SK/Bapp/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Tahun 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 7 Januari 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA


Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.

Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670918 198903 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN
TASIKMALAYA
NOMOR : 000.1.9/1563/SK/Bapp/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Bidang Pendanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya.
8. Kepala Sub Bidang Statistik Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya.
9. Pejabat Fungsional Perencana dan Peneliti pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Analis Perencanaan pada Perencanaan Evaluasi
Pelaporan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA


Drs. RUDI SOEJAYA SAEHURI, M.Pd.

Pemula Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670918 198903 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN
TASIKMALAYA
NOMOR : 000.1.9/1563/SK/Bapp/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026

KETUA

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.

WAKIL KETUA

Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

SEKRETARIS

- Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026;
- Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

ANGGOTA

- Menyiapkan bahan, data dan informasi terkait.
- Menyusun dan mengumpulkan rencana kerja masing-masing unit kerja sesuai tugas dan fungsi sebagai bahan rencana kerja.
- Melakukan penelitian dan analisis atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi / Korespondensi Pelaksanaan Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026;
- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. RUDI SONIAYA SAEHURI, M.Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670918 198903 1 007

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2026 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappelitbangda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun sebelumnya.

Tersusunnya Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Tahun 2025, sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan/sub kegiatan Bappelitbangda sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Singaparna, 25 Agustus 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA


Drs. RUDI SOEMAYA SAEHURI, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670918 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dan Capaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.....	II-38
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya	II-41
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	II-41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-74
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.....	III-14
--	--------

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA	IV-1
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.....	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappelitbangda dan Pencapaian Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2024 Kabupaten Tasikmalaya.....	II-2
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya	II-40
Tabel 2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.....	II-43
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya.....	II-74
Tabel 3.1.	Prioritas dan Sasaran Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.....	III-15
Tabel 3.2.	Tujuan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya	III-16
Tabel 3.3.	Sasaran Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya	III-17
Tabel 3.4.	Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.....	III-17
Tabel 4.1.	Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.....	IV-3
Tabel 4.2.	Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Tahun 2026.....	IV-7
Tabel 4.3.	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	IV-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA	I-3
Gambar 3.1. Target dan Sasaran Visi Indonesia Emas Menuju 2045	III-3
Gambar 3.2. Tahapan RPJPN	III-6
Gambar 3.3. Target Periode I RPJPN (2025-2029) Kontribusi PDRB (%)	III-6
Gambar 3.4. Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	III-7
Gambar 3.5. Visi Jawa Barat Tahun 2025-2029	III-11
Gambar 3.6. Misi Jawa Barat Tahun 2025-2029	III-11
Gambar 3.7. Tema Pembangunan Jawa Barat 2025-2029	III-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Disamping itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa seluruh perangkat daerah harus menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan pendanaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah memiliki kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan

Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan, urusan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda, serta merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2021-2026.

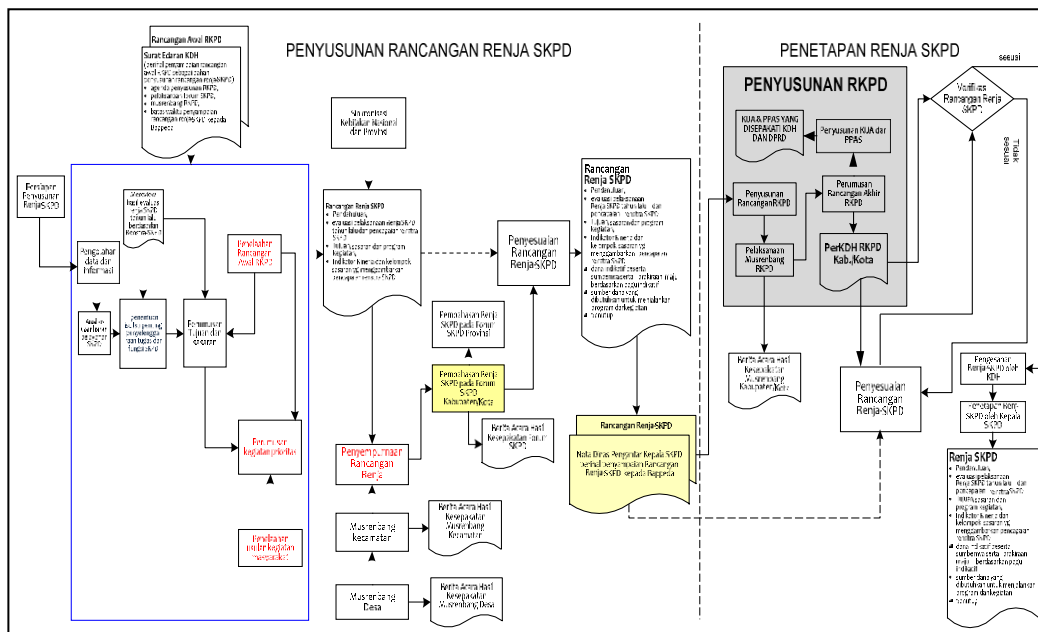
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, adalah meliputi :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA



Rencana Kerja Bappelitbangda disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKP serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappelitbangda. Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 akan dijadikan pedoman dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, dimana mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan. Renja tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Tahun 42);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77

- Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
 23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
34. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026;
35. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0004 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran / pagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026, untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya secara berkesinambungan dan sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026 yaitu :

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan
4. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Propinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dan Capaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU (Indikator Kinerja Utama), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

Perumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, isu-isu penting tersebut mencakup :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappelitbangda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bappelitbangda;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappelitbangda;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda;
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.
- Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang desa maupun kecamatan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi Bappelitbangda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappelitbangda.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

Berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif perangkat daerah.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappelitbangda tahun 2025 didasarkan pada Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026.

Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Bappelitbangda dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dan Capaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dan pencapaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappelitbangda dan
Pencapaian Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2024
Kabupaten Tasikmalaya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025								
			Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4								
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	600	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%
2	20	002	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan metadata statistik sektoral	600	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%
2	20	002	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025										
			Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)												
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4									
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01		PERENCANAAN																	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbangda	74	Point	70.07	Point	72.00	Point	82,45	Point	114,51	82,5	Point	82,5	Point	100%
					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Bappelitbangda	81.35	Point	78.995	Point	80,33	Point	85,18	Point	106,04	85,20	Point	85,20	Point	100%
5	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	100	8	Dokumen	8	Dokumen	100%
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100	6	Dokumen	6	Dokumen	100%
5	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase laporan pertanggungjaw	600	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025										
			Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)												
1	2	3	4		5	6		7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4								
	Daerah	aban keuangan yang sesuai aturan																		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	Orang/ Bulan	50	Orang/ Bulan	50	Orang/ Bulan	50	Orang/ Bulan	100	50	Orang/ Bulan	50	Orang/ Bulan	100%
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	12	Dokumen	12	Dokumen	100%
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	100%
5	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	600	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	72	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100	12	Paket	12	Paket	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025										
			Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)												
1	2	3	4		5	6			7	8=7/6	9	10=5+7+9		11=10/4						
5	01	01	2.06	05	Perengkapan Kantor	Perengkapan Kantor yang Disediakan	72	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100	12	Paket	12	Paket	100%
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	12	Dokumen	12	Dokumen	100%
5	01	01	2.06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	Laporan	100%
5	01	01	2.06	09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	Laporan	100%
5	01	01	2.06	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	Laporan	100%
5	01	01	2.06		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025															
			Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																	
1					2		3		4		5			6		7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4	
					Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
5	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	600	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%					
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	72	Unit	11	Unit	13	Unit	13	Unit	100	13	Unit	13	Unit	100%					
5	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%					
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	Laporan	100%					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025														
			Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)														
1					2		3		4		5			6			7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	12	Laporan	100%					
5	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daer	600	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%					
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	100	6	Unit	6	Unit	100%					
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	100	16	Unit	16	Unit	100%					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025										
			Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)												
1	2	3	4		5	6		7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4								
	Lapangan																			
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	Unit	12	Unit	12	Unit	12	Unit	100	12	Unit	12	Unit	100%
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	1	Unit	100%
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD	600	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%
5	01	002	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah	54	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	100	8	Dokumen	8	Dokumen	100%
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025						
			6	Dokumen		1	Dokumen	1		Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
1	2	3	4		5	6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4			
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8	Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	100	1	Berita Acara	1	Berita Acara	100%
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8	Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	100	1	Berita Acara	1	Berita Acara	100%
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	4212	Usulan	702	Usulan	702	Usulan	702	Usulan	100	702	Usulan	702	Usulan	100%
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	20	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3	Dokumen	3	Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025										
			Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)												
1	2	3	4		5	6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4							
5	01	002	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	600	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%		
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	Masukan	1	Masukan	1	Masukan	1	Masukan	100	1	Masukan	1	Masukan	100%
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	4890	Orang	815	Orang	815	Orang	815	Orang	100	815	Orang	815	Orang	100%
5	01	002	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	66	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100	11	Laporan	11	Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025															
					Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)														
1					2		3		4		5		6		7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4	
					Daerah																			
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	60	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100	10	Laporan	10	Laporan	100%				
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	100%				
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan	600	Persen	N/A	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025					
			600	Persen	N/A	Persen	Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		100	Persen	100	Persen	100	Persen
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9		11=10/4
		Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/ RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	600	Persen	N/A	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%
		Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen	600	Persen	N/A	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025										
			Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)												
1	2	3	4		5	6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4							
		Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/ RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																		
5	01	003	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	24	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	4	Dokumen	4	Dokumen	100%
					Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025											
					Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4										
		perencanaan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	54	Perangkat Daerah	9	Perangkat Daerah	9	Perangkat Daerah	9	Perangkat Daerah	100	9	Perangkat Daerah	9	Perangkat Daerah	100%
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025								
			Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
1	2	3	4		5	6		7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4						
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)																
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	18	Perangkat Daerah	3	Perangkat Daerah	3	Perangkat Daerah	100	3	Perangkat Daerah	3	Perangkat Daerah	100%
5	01	003	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	24	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	2	Dokumen	2	Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025									
			30	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5		Dokumen	8=7/6	5	Dokumen	5	Dokumen	10=5+7+9	11=10/4		
1	2	3	4		5		6			7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4					
		Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	30	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100	5	Dokumen	5	Dokumen	100%		
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Perangkat Daerah Renstra/Renja Bidang	18	Perangkat Daerah	3	Perangkat Daerah	3	Perangkat Daerah	3	Perangkat Daerah	100	3	Perangkat Daerah	3	Perangkat Daerah	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025															
						Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)														
1					2		3		4		5			6		7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4	
					Perekonomian	Perekonomian																			
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%			
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	12	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	100	2	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	100%			
5	01	003	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	24	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025							
			Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
1	2	3	4		5	6		7	8=7/6	9	10=5+7+9		11=10/4				
		Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	18	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	12	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	2	Perangkat Daerah	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025									
			Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)											
1	2	3	4		5	6		7	8=7/6	9	10=5+7+9		11=10/4						
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	Dokumen	100%			
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Perangkat Daerah Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	6	Perangkat Daerah	1	Perangkat Daerah	1	Perangkat Daerah	1	Perangkat Daerah	100	1	Perangkat Daerah	1	Perangkat Daerah	100%			
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbang	600	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%			
5 05 002 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100.00	1	Laporan	1	Laporan	100%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025										
			Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)												
1	2	3	4		5	6		7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4								
	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																		
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	100%
5	05	002	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappelitbangda) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Bappelitbangda Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappelitbangda s/d Tahun 2025															
			Target Renja Bappelitbangda Tahun 2024	Realisasi Renja Bappelitbangda Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																	
1					2		3		4		5			6		7		8=7/6		9		10=5+7+9		11=10/4	
					Perdagangan	Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																			
5	05	002	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	2	Laporan	100%					
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	100%					
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	100%					

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan sebagai urusan penunjang pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.459.972.629,-. Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya meliputi 5 (lima) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) Sub Kegiatan.

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 189.000.000,- . Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 184.741.654,- atau 97,75%.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 189.000.000,- . Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 184.741.654,- atau 97,75%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 189.000.000,- . Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 184.741.654,- atau 97,75%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 11.433.372.729,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 10.925.797.404,- atau 95,56%.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 242.000.000,- . Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 241.882.135,- atau 99,95%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 147.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 146.944.884,- atau 99,96%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Dokumen Renja Tahun 2025 dan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 94.937.251,- atau 99,93%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu Laporan Evaluasi Hasil Renja, Laporan Bulanan, LKIP, LKPJ, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.328.272.629,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 6.914.864.066,- atau 94,36%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 7.278.272.629,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 6.864.928.066,- atau 94,32%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- , adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 49.936.000,- atau 99,87%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 953.119.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 935.961.436,- atau 98,20%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 195.704.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 184.473.000,- atau 94,26%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 66.514.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 64.708.900,- atau 97,29%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 49.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 48.995.000,- atau 99,99%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, sedangkan

outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

- 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 88.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 87.719.835,- atau 99,68%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 553.901.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 550.064.701,- atau 99,31%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 688.040.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 652.340.000,- atau 94,81%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 347.950.000,- atau 99,41%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 156.000.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 154.900.000,- atau 99,29%.

Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya.

- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 182.040.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 149.490.000,- atau 82,12%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.220.902.100,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.196.815.847,- atau 98,03%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 482.202.100,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 458.187.720,- atau 95,02%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 738.700.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 738.628.127,- atau 99,99%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang

Disediakan. Sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.001.039.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 983.933.920,- atau 98,29%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 375.825.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 367.948.600,- atau 97,90%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 141.350.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 137.916.626,- atau 97,57%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 192.588.000,-, adapun realisasi

anggarannya sebesar Rp. 191.508.740,- atau 99,44%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 291.276.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 286.559.954,- atau 98,38%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

C. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.537.500.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.362.414.292,- atau 88,61%.

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.327.810.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.154.563.532,- atau 86,95%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 345.373.500,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 297.363.500- atau 86,10%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD.

- 2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 142.200.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 62.628.071,- atau 44,04%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain.
- 3) Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 98.990.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 96.063.700,- atau 97,04%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Konsultasi Publik.
- 4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 212.800.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 211.754.190,- atau 99,51%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota.
- 5) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 52.285.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 50.982.541,- atau 97,51%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Usulan Usulan yang telah Terverfifikasi oleh Kecamatan.
- 6) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 476.161.500,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 435.771.530,- atau 91,52%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 109.690.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp 108.505.562,- atau 98,92%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 100.496.800,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 100.396.362,- atau 99,90%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
- b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 9.193.200,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 8.109.200,- atau 88,21%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

c. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp 99.345.198,- atau 99,35%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp 99.345.198,- atau 99,35%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

D. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.586.099.900,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.569.446.296,- atau 98,95%.

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 641.999.900,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 633.034.434,- atau 98,60%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 239.433.900,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 238.077.069,- atau 99,43%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

- b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat dengan anggaran sebesar Rp. 29.066.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 29.066.000,- atau 100%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
- c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 270.590.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 265.325.015,- atau 98,05%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 102.910.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 100.566.350,- atau 97,72%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan anggaran sebesar Rp. 503.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 500.147.200,- atau 99,43%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 220.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 219.957.600,- atau 99,98%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 29.999.800,- atau 99,99%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
- c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 218.000.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 215.189.800,-

atau 98,71%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

- d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 35.000.000,- atau 100%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp. 441.100.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 436.264.662,- atau 98,90%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 199.121.763,- atau 99,56%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan

- Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 191.100.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 188.902.899,- atau 98,85%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 23.240.000,- atau 92,96%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

E. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 714.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 669.199.324,- atau 93,73%.

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 111.832.800,- atau 82,84%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 135.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 111.832.800,- atau 82,84%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 314.542.900,- atau 96,78%.

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-, adapun

realisasi anggarannya sebesar Rp. 70.905.300,- atau 94,54%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial.

- b. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 243.637.600,- atau 97,46%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata.

3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan anggaran sebesar Rp. 254.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 242.823.624,- atau 95,60%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- a. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif dengan anggaran sebesar Rp. 254.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 242.823.624,- atau 95,60%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 realisasi capaian target program/kegiatan Renstra telah tercapai 100%, untuk tahun 2026 realisasi capaian target program/ kegiatan direncanakan dapat tercapai 100%, oleh karena itu perlu adanya strategi yang tepat sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai

sesuai perencanaan.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Tahun 2026 memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang dimiliki, dengan berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan mengacu kepada RKPD. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra perangkat daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yaitu melaksanakan urusan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik.

Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pengoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;

5. Pembinaan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
6. Penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta Analisa strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
7. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik;
8. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2024 dan Perkiraan capaian Tahun 2025, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi Realisasi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	Poin	60	63	66	70	78,65	89,10	66	70	
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	21,70	21,80	24,95	25,25	21,80	21,87	24,95	25,25	
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	88	100	100	100	90	100	100	100	

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana.

Adapun isu-isu penting yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappelitbangda, yaitu antara lain:

1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur belum terpenuhi sesuai kebutuhan ideal organisasi;
2. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
3. Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI);
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan Pembangunan;
5. Penguatan fungsi koordinasi.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur;
2. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas dan kesesuaian/sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah; dan
5. Mengoptimalkan hasil kajian pembangunan daerah dan pengembangan data informasi pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Penyusunan RKPD tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Rancangan Awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara umum rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				17.500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				17.500.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				395.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				395.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				395.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				395.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kab. Tasikmalaya	100%	395.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kab. Tasikmalaya	100%	395.000.000	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Metadata Statistik Sektoral	Kab. Tasikmalaya	100%	395.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Metadata Statistik Sektoral	Kab. Tasikmalaya	100%	395.000.000	
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang	Kab. Tasikmalaya	100%	40.000.000	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang	Kab. Tasikmalaya	100%	40.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk					telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Kab. Tasikmalaya	100%	140.000.000	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Kab. Tasikmalaya	100%	140.000.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Tasikmalaya	42 Orang	175.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Tasikmalaya	42 Orang	175.000.000	
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi	Kab. Tasikmalaya	100%	40.000.000	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi	Kab. Tasikmalaya	100%	40.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral					dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN				17.105.000.000	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN				17.105.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				13.253.724.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				13.253.724.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbangda	Kab. Tasikmalaya	82,6 Poin	266.200.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbangda	Kab. Tasikmalaya	82,6 Poin	266.200.000	
	Nilai IKM Bappelitbangda		85,30 Poin			Nilai IKM Bappelitbangda		85,30 Poin		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	2 Dokumen	161.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	2 Dokumen	161.700.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	6 Laporan	104.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	6 Laporan	104.500.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	Kab. Tasikmalaya	100%	8.056.786.076	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	Kab. Tasikmalaya	100%	8.056.786.076	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya	50 Orang/Bulan	8.001.786.076	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya	50 Orang/Bulan	8.001.786.076	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	55.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	55.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN Bappelitbangda	Kab. Tasikmalaya	100%	300.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN Bappelitbangda	Kab. Tasikmalaya	100%	300.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tasikmalaya	20 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tasikmalaya	20 Orang	100.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya	40 Orang	200.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya	40 Orang	200.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	Kab. Tasikmalaya	100%	1.024.938.025	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	Kab. Tasikmalaya	100%	1.024.938.025	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	12 Paket	229.124.625	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	12 Paket	229.124.625	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	12 Paket	55.213.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	12 Paket	55.213.400	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	12 Dokumen	63.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	12 Dokumen	63.800.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya	12 Laporan	96.800.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya	12 Laporan	96.800.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya	12 Laporan	580.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya	12 Laporan	580.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	Kab. Tasikmalaya	100%	1.210.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	Kab. Tasikmalaya	100%	1.210.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmalaya	3 Unit	900.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmalaya	3 Unit	900.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	yang Disediakan					yang Disediakan				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	12 Unit	210.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	12 Unit	210.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	10 Unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	10 Unit	100.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tasikmalaya	100%	1.410.799.899	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tasikmalaya	100%	1.410.799.899	
Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kab. Tasikmalaya	12 Laporan	533.989.899	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kab. Tasikmalaya	12 Laporan	533.989.899	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	12 Laporan	876.810.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tasikmalaya	12 Laporan	876.810.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tasikmalaya	100%	985.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tasikmalaya	100%	985.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmalaya	6 Unit	375.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmalaya	6 Unit	375.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tasikmalaya	15 Unit	180.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tasikmalaya	15 Unit	180.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tasikmalaya	15 Unit	180.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tasikmalaya	15 Unit	180.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tasikmalaya	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tasikmalaya	1 Unit	150.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tasikmalaya	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tasikmalaya	1 Unit	100.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD	Kab. Tasikmalaya	100%	1.520.750.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD	Kab. Tasikmalaya	100%	1.520.750.000	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tasikmalaya	709 Dokumen	1.330.320.200	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tasikmalaya	709 Dokumen	1.330.320.200	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Kab. Tasikmalaya	1 Dokumen	62.359.550	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Kab. Tasikmalaya	1 Dokumen	62.359.550	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pembangunan Daerah	(Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				Pembangunan Daerah	(Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kab. Tasikmalaya	2 Dokumen	409.805.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kab. Tasikmalaya	2 Dokumen	409.805.000	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Tasikmalaya	1 Berita Acara	114.994.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Tasikmalaya	1 Berita Acara	114.994.000	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	1 Berita Acara	255.695.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	1 Berita Acara	255.695.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kab. Tasikmalaya	702 Usulan	66.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kab. Tasikmalaya	702 Usulan	66.000.000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	Kab. Tasikmalaya	2 Dokumen	421.466.650	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	Kab. Tasikmalaya	2 Dokumen	421.466.650	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tasikmalaya	15 Laporan	134.079.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tasikmalaya	15 Laporan	134.079.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tasikmalaya	14 Laporan	112.873.200	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tasikmalaya	14 Laporan	112.873.200	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	21.205.800	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	21.205.800	
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. Tasikmalaya	2 Dokumen	56.350.800	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. Tasikmalaya	2 Dokumen	56.350.800	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. Tasikmalaya	2 Dokumen	56.350.800	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. Tasikmalaya	2 Dokumen	56.350.800	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Tasikmalaya	100%	1.730.526.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Tasikmalaya	100%	1.730.526.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah (RKPD/RPJMD /RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					Daerah (RKPD/RPJMD /RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
	Persentase kesesuaian Program/Kegia tan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENST RA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Tasikm alaya	100%			Persentase kesesuaian Program/Kegia tan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENST RA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Tasikm alaya	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah (RKPD/RPJMD /RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)					Daerah (RKPD/RPJMD /RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)				
	Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Tasikmalaya	100%			Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Tasikmalaya	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	Daerah (RKPD/RPJMD /RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					Daerah (RKPD/RPJMD /RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Tasikmalaya	6 Dokumen	657.476.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Tasikmalaya	6 Dokumen	657.476.000		
	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup bidang	Kab. Tasikmalaya	10 Dokumen			Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup bidang	Kab. Tasikmalaya	10 Dokumen			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tasikmalaya	3 Dokumen	264.153.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tasikmalaya	3 Dokumen	264.153.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Tasikmalaya	3 Laporan	16.225.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Tasikmalaya	3 Laporan	16.225.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Tasikmalaya	2 Laporan	26.198.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Tasikmalaya	2 Laporan	26.198.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tasikmalaya	3 Dokumen	312.950.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tasikmalaya	3 Dokumen	312.950.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	Kab. Tasikmalaya	3 Laporan	16.225.000	Asistensi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	Kab. Tasikmalaya	3 Laporan	16.225.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Tasikmalaya	3 Laporan	21.725.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Tasikmalaya	3 Laporan	21.725.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Tasikmalaya	6 Dokumen	553.300.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kab. Tasikmalaya	6 Dokumen	553.300.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
dan SDA (Sumber Daya Alam)	lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)				dan SDA (Sumber Daya Alam)	lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)				
	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Kab. Tasikmalaya	10 Dokumen			Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Kab. Tasikmalaya	10 Dokumen		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya	Kab. Tasikmalaya	3 Dokumen	225.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya	Kab. Tasikmalaya	3 Dokumen	225.500.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)					(RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Tasikm alaya	3 Laporan	16.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Tasikm alaya	3 Laporan	16.500.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Tasikm alaya	2 Laporan	33.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Tasikm alaya	2 Laporan	33.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tasikmalaya	3 Dokumen	223.300.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tasikmalaya	3 Dokumen	223.300.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Tasikmalaya	3 Laporan	16.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Tasikmalaya	3 Laporan	16.500.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Kab. Tasikmalaya	2 Laporan	38.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Kab. Tasikmalaya	2 Laporan	38.500.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Tasikm alaya	6 Dokumen	519.750.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Tasikm alaya	6 Dokumen	519.750.000	
	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Tasikm alaya	10 Dokumen			Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Tasikm alaya	10 Dokumen		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tasikm alaya	3 Dokumen	220.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tasikm alaya	3 Dokumen	220.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Tasikm alaya	3 Laporan	27.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Tasikm alaya	3 Laporan	27.500.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan	Kab. Tasikm alaya	2 Laporan	27.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan	Kab. Tasikm alaya	2 Laporan	27.500.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tasikmalaya	3 Dokumen	189.750.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tasikmalaya	3 Dokumen	189.750.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Tasikmalaya	3 Laporan	27.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab. Tasikmalaya	3 Laporan	27.500.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Tasikmalaya	2 Laporan	27.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Tasikmalaya	2 Laporan	27.500.000	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				600.000.000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				600.000.000	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Kab. Tasikmalaya	100%	600.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Kab. Tasikmalaya	100%	600.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	75.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	75.000.000	
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	75.000.000	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	75.000.000	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengembangan	Kab. Tasikmalaya	3 Laporan	525.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengembangan	Kab. Tasikmalaya	3 Laporan	525.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Inovasi dan Teknologi					Inovasi dan Teknologi				
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Tasikmalaya	1 Dokumen	190.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Tasikmalaya	1 Dokumen	190.000.000	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	295.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	295.000.000	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	40.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	Kab. Tasikmalaya	1 Laporan	40.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	n Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					n Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				
Total Pagu Anggaran Rancangan Akhir RKPD				17.500.000.000	Total Pagu Anggaran Analisis Kebutuhan				17.500.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 sebagai perwujudannya bahwa prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bappelitbangda adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Bappelitbangda dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pada Tahun 2026, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan musrenbang desa maupun kecamatan yang ditujukan langsung kepada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 di Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya :

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026
dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Tasikmalaya

Nama Perangkat Daerah : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA
KABUPATEN TASIKMALAYA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Salah satu perubahan yang terjadi dan mempengaruhi arah kebijakan di Daerah yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa adanya pengalihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, dari Provinsi ke Pusat dan sebaliknya. Selain hal tersebut sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan beberapa peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hal ini menyebabkan bertambahnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan berubahnya skema pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam Rencana pembangunan tahunan dimaksud harus diwujudkan oleh RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memperhatikan pelaksanaan pembangunan dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Sebagai pelaksana fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dengan perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional pada Tahun 2026.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Pada 5 (lima) tahun ini yaitu Tahun 2025-2029 menjadi tahapan yang penting dalam RPJPN Tahun 2025-2045 untuk meletakkan dasar-dasar transformasi menjadi basis tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya serta menjadi pemicu untuk *engine of growth* yang baru yaitu : industry biru, industry kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai dengan produk akhir, dan industry hijau.

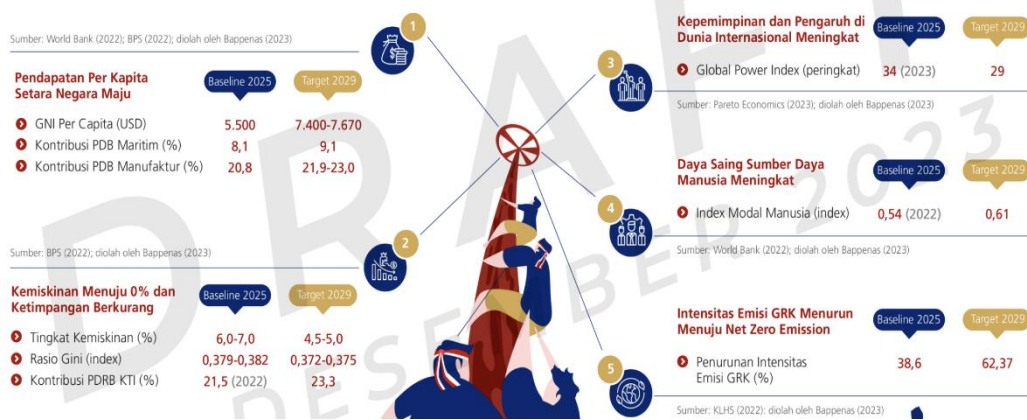
Sasaran visi pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu :

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; serta
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emission.

Kelima sasaran visi ini memiliki target sebagai berikut.

Gambar 3.1.

Target dan Sasaran Visi Indonesia Emas Menuju 2045



Sumber : Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2045

Tema dan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) Penguatan Fondasi Transformasi, sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial
Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan social
2. Transformasi Ekonomi
Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3. Transformasi Tata Kelola
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan Masyarakat sipil.
4. Supermasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
Memperkuat supermasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Memperkuat ketahanan social budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Kelima fondasi transformasi tersebut diwujudkan melalui upaya transformatif super prioritas (*Game Changers*) sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial

Pemenuhan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial

- a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
- b. Peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi Pendidikan;
- c. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga Pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- d. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberkulosis dan kusta);
- e. Penuntasan kemiskinan dengan satu system regsosek dan perlindungan social adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi

Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja

- a. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
- b. Industrialisasi : hilirisasi idustri berbasis SDA unggulan, industry padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
- c. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan Listrik terintegrasi serta trnaformasi hijau;
- d. *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
- e. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- f. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola

Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas

ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil.

- a. Pembentukan Lembaga Tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama system penggajian Tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
- b. Penguatan integritas partai politik.

4. Supremasi Hukum Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, yang membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketangguhan diplomasi.

- a. Transformasi system penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi Lembaga kejaksaan sebagai *Advocat General*;
- b. Transformasi industry pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industry nasional;
- c. Reformasi perencanaan dan fiskal : perencanaan dan pengendalian Pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
- d. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

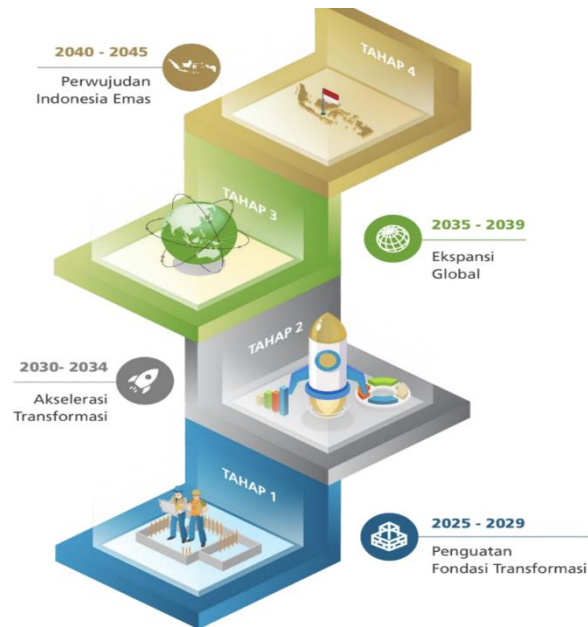
Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan.

- a. Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- b. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
- c. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, eater*)

RPJPN Tahun 2025 - 2045 merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan RPJPN Tahun 2025 - 2029 dimanifestasikan ke dalam 4 (empat) tema besar lima tahunan sebagai

berikut.

Gambar 3.2. Tahapan RPJPN

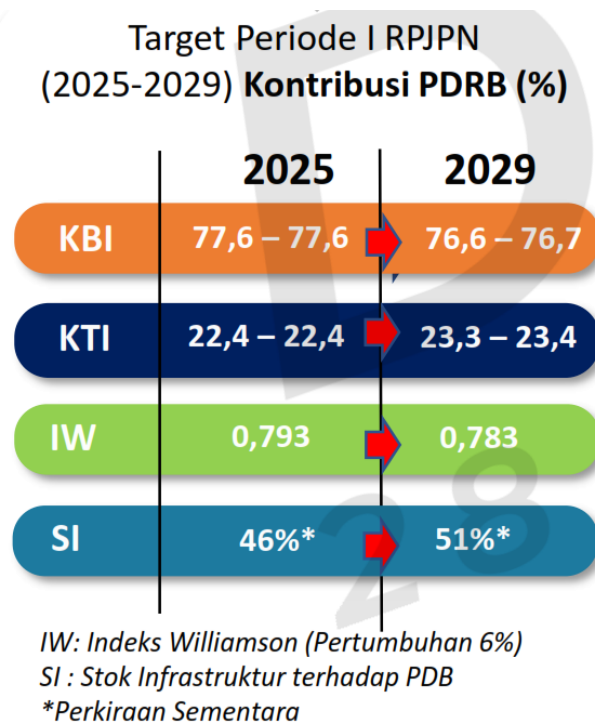


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas per Maret 2024

Sasaran visi 2045 yaitu kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang dengan target 2045 kontribusi PDRB yaitu KBI 71,5% dan KTI 28,5 %. Target Periode I RPJPN (2025-2029) Kontribusi PDRB (%) dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.3.

Target Periode I RPJPN (2025-2029) Kontribusi PDRB (%)



Tema dan sasaran Pembangunan wilayah dan sarana prasarana ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.4.

Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana



Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2026 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2026 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, Tema RKP Tahun 2026 ini yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”

Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen. Selain menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, beberapa sasaran pembangunan RKP 2026 ialah *Gross National Income* (GNI) per kapita 5.870 dolar Amerika Serikat (AS), penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 37,14 persen, indeks kualitas lingkungan hidup 76,67 persen,

tingkat kemiskinan turun menjadi 6,5-7,5 persen, rasio gini 0,377-0,380, serta indeks modal manusia 0,57. Untuk sasaran pertumbuhan ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2026 masing-masing 6,1 persen dan 7,1 persen. Adapun sejumlah strategi dan langkah mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ialah peningkatan produktivitas industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya, peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, lalu swasembada energi melalui ekonomi hijau. Kemudian juga peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital, serta peningkatan investasi produktif terutama *Foreign Direct Investment*/Penanaman Modal Asing berorientasi ekspor dan investasi non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita. Berikut 8 (delapan) prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

- gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
 8. Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Arah Pembangunan untuk wilayah pulau Jawa difokuskan pada tema pembangunan “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif,

Terintegrasi, dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan Propinsi Jawa Barat dikhususkan menjadi “Pusat *Cutting-edge industry*, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional”. Tema tersebut memberikan makna bahwa fokus intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di pulau Jawa pada tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan *logistic cost* guna meningkatkan *comparative advantage* investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjungpriok dan Tanjungperak);
4. Pengelolaan urban givernance pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transformasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan pemukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
5. Pengembangan perguruan tinggi riset STEAM bertaraf internasional guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu global *brain hub*;
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (*green*, *gray*, dan *social infrastructure* terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancamaman bencana; abrasi, rob, penurunan tanah, banjir).

Kebijakan Provinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dimana rancangan visi Jawa Barat tahun 2025-2029 yaitu

“Istimewa”

Situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini

adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur berkeinginan/berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga Visi Jabar Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi istimewa : Pendidikan Istimewa, Kesehatan Istimewa, Infrastruktur Istimewa, Ekonomi Masyarakat Istimewa, Sosial Budaya Istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa.

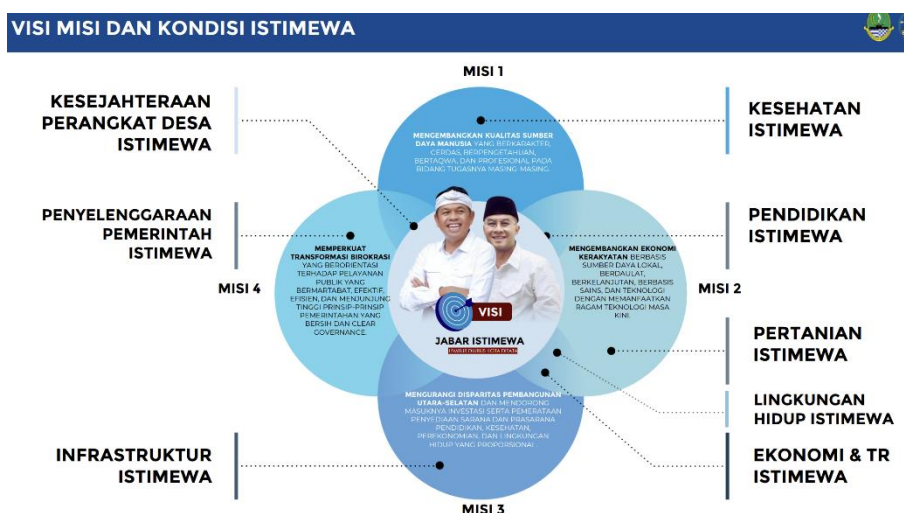
Gambar 3.5. Visi Jawa Barat Tahun 2025-2029

RANCANGAN VISI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

INDONESIA EMAS 2045 VISI INDONESIA 2025-2045	Jabar Termaju Indonesia Emas 2045 VISI JAWA BARAT 2025-2045	Jabar Istimewa Lembur Durus Kota Dikota VISI JAWA BARAT 2025-2029
<ul style="list-style-type: none"> Berdaulat Negara Kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritime dunia Maju Berdaya, modern, Tangguh, inovatif dan adil. Berkelanjutan Pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial dan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Termaju Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat kemajuan dan perkembangan pembangunan yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Berdaya Saing Dunia Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan kompetitif di tingkat dunia dalam berbagai aspek. Berkelanjutan Menjamin kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik dalam jangka panjang secara berkesinambungan selama 4 (empat) tahap periodisasi pembangunan untuk mencapai visi Jawa Barat pada tahun 2045. 	<p>Istimewa situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur berkeinginan/berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan.</p> <p>Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga Visi Jabar Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi istimewa : Pendidikan Istimewa, Kesehatan Istimewa, Infrastruktur Istimewa, Ekonomi Masyarakat Istimewa, Sosial Budaya Istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa.</p>

Visi misi dan kondisi Istimewa dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.6. Misi Jawa Barat Tahun 2025-2029



Dalam rangka mendukung visi misi tersebut, ada 9 (sembilan) langkah untuk mewujudkan Jabar Istimewa diantaranya:

1. Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi listrik masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (Open Defecation Free/ bebas buang air besar sembarangan).
2. Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya.
3. Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa persekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.
4. Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan;
5. Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat.
6. Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.
7. Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi

sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan.

8. Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).
9. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, LInmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.

Tema Pembangunan Jawa Barat tahun 2025-2029 adalah: “Perwujudan Jawa Barat Istimewa melalui Kesejahteraan dan Kemakmuran Masyarakat Jawa Barat”. Tema tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.7. Tema Pembangunan Jawa Barat 2025-2029



Adapun target indikator makro Jawa Barat tahun 2026 berdasarkan hasil proyeksi berdasarkan rancangan RPJMN 2025-2029 diantaranya ;

- Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,20
- Tingkat Kemiskinan sebesar 6,35
- Indeks Gini sebesar 0,381
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,49
- Indeks Modal Manusia sebesar 0

- Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 7,2

Program dan proyek strategis tahun 2026 yaitu kemiskinan ekstrem, stunting, tingkat pengangguran terbuka, makan bergizi gratis, swasembada pangan, inflasi, proyek strategis dan hilirisasi.

Berdasarkan arah kebijakan nasional dan propinsi Tahun 2026, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dukungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2026 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan Tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda yaitu terdapat pada Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2025 - 2029, yaitu ***Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel.***

Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun dan merumuskan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut maka Bappelitbangda mempunyai Tujuan dan Sasaran Strategis beserta

Indikator Capaiannya sesuai dengan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta layanan statistik yang berkualitas.

Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Bappelitbangda;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah;
3. Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang bermanfaat;
4. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah;
5. Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah ;

1. Indeks Reformasi Birokrasi Bappelitbangda.
2. Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten.
3. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.
4. Indeks Inovasi Daerah.
5. Indeks Pembangunan Statistik

Tabel 3.1.
Prioritas dan Sasaran Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)
1.	T.5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Nilai Reformasi Birokrasi General (RB General)	S1. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Bappelitbangda	Indeks Reformasi Birokrasi Bappelitbangda

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)
				S2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten
				S3. Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang bermanfaat	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
				S4. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah
				S5. Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	Indeks Pembangunan Statistik

Tabel 3.2.
Tujuan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta layanan statistik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	89,25 Poin
		Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten	22 Poin
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 Persen
		Indeks Inovasi Daerah	49 Poin
		Indeks Pembangunan Statistik	2,76 Poin

Tabel 3.3.
Sasaran Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Bappelitbangda	Indeks Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	89,25 Poin
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten	22 Poin
3.	Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang bermanfaat	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 Persen
4.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	49 Poin
5.	Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,76 Poin

Tabel 3.4.
Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Bappelitbangda	Indeks Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	89,25 Poin
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten	22 Poin
3.	Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang bermanfaat	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 Persen
4.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	49 Poin

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
5.	Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,76 Poin

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA
KABUPATEN TASIKMALAYA

Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja (*Work Plan Report*) Tahun 2026 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategis (*Strategic Plan Report*). Rencana strategis atau disebut dengan Renstra sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik.

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

Renja PD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan perkiraan maju. Rencana kerja dan pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Disamping itu juga dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut:

1. Tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu membantu

Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam perencanaan pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik serta tugas lain yang diberikan Bupati;

2. Fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, antara lain:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Pengekoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengekoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. Pembinaan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
 - f. Penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisa strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
 - g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik;
 - h. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2026 terdiri dari 5 Program, 18 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Hasil perumusan program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Tasikmalaya tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3
1.	Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
		a. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		1) Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektor Dalam Sistem Statistik Nasional
		2) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
		3) Peningkatan Kualitas Statistik Sektor
		4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor
5) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektor Sesuai Standar		
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Bappelitbangda	2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
1	2	3	
		c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		1)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		2)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		3)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		4)	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		5)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		1)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		2)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah	3.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
		a.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		1)	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
1	2	3	
			2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 3) Pelaksanaan Konsultasi Publik 4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 5) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 6) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
		b.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		c.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
		4.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
1	2	3	
			<ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
		c.	<p>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
4.	Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang bermanfaat	5.	<p>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</p> <p>a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
1	2	3		
			2)	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
			b.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
			1)	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
5.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		c.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
			1)	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Berikut dipaparkan juga Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Berdasarkan 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Tahun 2026 yakni :

Tabel 4.2.
Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Tahun 2026

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
1	2	3			4	5
1.	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		225.000.000	
		a.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		225.000.000	
			1)	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	25.000.000	
			2)	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	35.000.000	
			3)	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	120.000.000	
			4)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	25.000.000	
			5)	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	20.000.000	
2.	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.834.295.519	
		a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		242.000.000	
			1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	147.000.000	

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
		2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.000.000	
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.041.788.509	
		1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.001.788.509	
		2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.000.000	
		c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.614.702	
		1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.614.702	
		d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000	
		1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	
		e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	999.354.308	
		1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.650.000	
		2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.941.340	
		3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.000.000	
		4) Fasilitasi Kunjungan Tamu	88.000.000	
		5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.166.000	
		6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	38.596.968	
		f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	280.000.000	
		1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	
		2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	
		g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.293.750.000	
		1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.650.000	
		2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	797.100.000	

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
		h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	889.788.000	
		1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.675.000	
		2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.525.000	
		3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.588.000	
		4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
3.	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	3. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	934.988.050	
		a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	761.870.050	
		1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	39.340.500	
		2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	144.793.050	
		3) Pelaksanaan Konsultasi Publik	70.485.000	
		4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	114.100.000	
		5) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	60.000.000	
		6) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	333.151.500	
		b. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	121.890.000	
		1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	102.612.000	

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp)	Ket.	
1	2	3			4	5	
			2)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	19.278.000		
			c.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	51.228.000		
			1)	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	51.228.000		
4.	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	4.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1.479.923.678	
			a.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	504.423.888		
			1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	141.235.712		
			2)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11.043.250		
			3)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.478.152		
			4)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.166.774		
			5)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.750.000		
			6)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	19.750.000		
			b.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	502.999.790		

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
		1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	204.999.965	
		2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14.999.965	
		3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.999.965	
		4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	202.999.965	
		5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.999.965	
		6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	34.999.965	
		c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	472.500.000	
		1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200.000.000	
		2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.000.000	
		3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.000.000	
		4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	172.500.000	
		5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.000.000	

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
1	2	3			4	5
			6)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.000.000	
5.	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	5.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		503.000.000	
		a.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		50.000.000	
			1)	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	20.000.000	
			2)	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	30.000.000	
		b.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		48.000.000	
			1)	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	48.000.000,	
		c.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		405.000.000	
			1)	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	405.000.000	
JUMLAH					14.977.207.247	

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						14.977.207.247								19.693.208.864	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						225.000.000								566.500.000	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						225.000.000								566.500.000	
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah				100%	225.000.000								566.500.000	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase buku profil daerah yang sesuai kebutuhan perencanaan dan evaluasi				100%	225.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			566.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional															
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				100%	25.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan			132.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01.0018	Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				100%	35.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			44.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statisti sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data				100%	120.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			154.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				42 Orang	25.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			192.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan				100%	20.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum	Peningkatan Kualitas Aparatur dan			44.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			kegiatan statistik sektoral						Kecamatan, Semua Kel/Desa	(DAU)	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.752.207.247							19.126.708.864		
	5.01	PERENCANAAN						14.249.207.247							18.173.283.864		
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Bappelitbangda				83 Poin	11.834.295.519							14.596.880.704		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappelitbangda				83 Poin	242.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			292.820.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	147.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			177.870.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	95.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			114.950.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
											pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan						
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Bappelitbangda				100%	8.041.788.509			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			8.862.286.076	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	8.001.788.509	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			8.801.786.076	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	40.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			60.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi				100%	12.614.702				Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan,			35.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan				
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12.614.702	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian Bappelitbangda				100%	75.000.000				Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			375.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean			45.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Governance Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan				
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					20 Orang	75.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan		110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					40 Orang	0	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan		220.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Bappelitbangda				100%	999.354.308			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan		1.164.394.740	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Paket	216.650.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan		252.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12 Paket	42.941.340	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan		60.734.740	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan					
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	58.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			70.180.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	88.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			106.480.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	555.166.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			640.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	38.596.968	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif,			35.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
									Semua Kel/Desa		serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan				PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah pada Bappelitbangda				100%	280.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			1.232.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	0	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			990.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	200.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			231.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	80.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			11.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang pada Bappelitbangda				100%	1.293.750.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			1.551.879.888	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	496.650.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			587.388.888	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	797.100.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			964.491.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											penyeludupan					
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Bappelitbangda yang berfungsi dengan baik				100%	889.788.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			1.083.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	350.675.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			412.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	169.525.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			198.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	169.588.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			198.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									dan penyeludupan					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			165.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	0	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah				100%	934.988.050							1.672.825.000	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah				100%	761.870.050			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			1.463.352.220	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai				1 Dokumen	39.340.500	Kab. Tasikmalaya, Semua	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum	Peningkatan Kualitas Aparatur dan			68.595.505	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)						Kecamatan, Semua Kel/Desa	(DAU)	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya													
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	144.793.050	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			450.785.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	70.485.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			126.493.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	114.100.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			281.264.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				702 Usulan	60.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			72.600.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	333.151.500	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			463.613.315	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti				100%	121.890.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			147.486.900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				14 Laporan	102.612.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			124.160.520	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	19.278.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			23.326.380	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	51.228.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			61.985.880	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				2 Dokumen	51.228.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			61.985.880	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100%	1.479.923.678							1.903.578.160	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan				100%	504.423.888			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			723.223.160	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Manusia								pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan					
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)				3 Dokumen	141.235.712	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			290.568.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	11.043.250	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			17.847.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	17.478.152	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			28.817.360	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan				3 Dokumen	300.166.774	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola			344.245.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Semua Kel/Desa		serta memperkuat pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemerintahan				PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	14.750.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			17.847.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	19.750.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			23.897.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam				100%	502.999.790			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			608.630.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				3 Dokumen	204.999.965	Kab. Tasikmalaya, Semua	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum	Peningkatan Kualitas Aparatur dan			248.050.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)						Kecamatan, Semua Kel/Desa	(DAU)	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Laporan	14.999.965	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			18.150.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	29.999.965	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			36.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)				3 Dokumen	202.999.965	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			245.630.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	14.999.965	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			18.150.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	34.999.965	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			42.350.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan kewilayahan				100%	472.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			571.725.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	200.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			242.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	25.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			30.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	25.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			30.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	172.500.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			208.725.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	25.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			30.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	25.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			30.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						503.000.000							953.425.000	
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Daerah yang Dirujuk dalam Dokumen Perencanaan				100%	503.000.000							953.425.000	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Memenuhi Standar				100%	50.000.000				Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			220.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	0	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas			110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	20.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			27.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	30.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			82.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Bidang Sosial dan Kependudukan yang Memenuhi Standar				100%	48.000.000				Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			155.925.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	48.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean			155.925.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Governance Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan				
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Kelitbangan yang Didiseminasikan				100%	405.000.000				Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			577.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	0	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			209.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	0	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			324.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	405.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan			44.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
J U M L A H								14.977.207.247							19.693.208.864	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Bappelitbangda, tema dan prioritas pembangunan daerah, analisis kebutuhan, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran daerah, sasaran Perangkat Daerah serta pagu indikatif Perangkat Daerah. Pada Rumusan Rencana Kerja Bappelitbangda memuat 5 Program, 18 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan pada tahun 2026 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 14.977.207.247,00 (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur, dan akuntabel yang dijadikan dasar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah kunci awal kesuksesan pembangunan daerah. Kualitas rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk menjamin agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi

kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 merupakan Perencanaan Tahunan yang bersifat operasional, dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2026 ini, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan, serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 secara efektif dan efisien;
2. Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2026 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Tata cara penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
4. Renja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan memperhatikan dan

menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, 25 Agustus 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. RUDI SUTAWA SAEHURI, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670918 198903 1 007